

TAJUK RENCANA

Durian Musang King Rp 40 Juta

PEMBERITAAN di media massa belakangan ini banyak diwarnai dari liputan sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Banyak kesaksian mencendangkan terungkap dalam persidangan ini. Tidak mustahil, dalam proses persidangan berikutnya masih muncul hal-hal lain yang tidak terduga, bahkan bisa membuat kita geregetan.

Bagaimana tidak? Para saksi yang dihadirkan mengungkapkan berbagai ironi tindakan tak wajar di Kementerian yang mestinya memakmurkan para petani. Misalnya pada sidang Senin (20/5), saksi Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, mengaku pernah beberapa kali mengirim durian Musang King seharga Rp 20 juta hingga Rp 40 juta ke rumah dinas SYL, bahkan konon harganya sampai Rp 46 juta.

Tampaknya sang menteri dan koleganya suka pesta durian dan durian yang dipilih bukan sembarang durian, tetapi yang super mahal. Harga durian yang sekali pengiriman paling sedikit terdiri 6 kotak dan perkotak berisi lima sampai tujuh durian itu bukan harga yang murah, tetapi sangat fantastis. Ironi sekali, di saat para petani banyak kesulitan dan permasalahan, juga penghasilannya pas-pasan, Pak Menteri dan kroninya justru berpesta-pora durian. Paling tidak pembelian durian ini sampai tujuh kali.

Bukan hanya durian-durian mahal yang dibeli dengan uang kantor, tetapi juga berbagai keperluan pribadi Pak Menteri, istri, anak, bahkan cucu dan kakaknya, juga dipenuhi dengan tidak merogoh kocek pribadi, meski pasti gajinya besar, jauh dari penghasilan para petani, melainkan dicari-cari dari uang di Kementan. Dalam persidangan terungkap, pembiayaan pribadi tersebut antara lain untuk kakak SYL setiap bulan Rp 10 juta, umrah keluarga Rp 1.350.000.000, pendaftaran Bacaleg ke Partai Nasdem Rp 860.000.000, mobil Innova untuk anak SYL Rp 500.000.000, THR untuk 5 pimpinan Komisi IV DPR RI Rp

500.000.000, kado undangan Rp 381.000.000, maintenance apartemen Rp 300.000.000, tagihan kartu kredit Rp 215.000.000, beli lukisan Rp 200.000.000, sawer Biduan Rp 100.000.000, beli Dolar di bank Rp 64.000.000, perawatan anak SYL Rp 50.000.000, cicilan mobil Alphard Rp 43.000.000/bulan, uang jajan istri Rp 30.000.000, beli emas untuk, undangan Rp 7.000.000, parfum Rp 5.000.000 dan biaya makan minum di rumah dinas per hari Rp 3.000.000. Konon juga ada untuk membeli keris Rp 105 juta

Melihat angka-angka tersebut pasti banyak *gedheg-gedheg*, ternyata berbagai tindak korupsi tersebut selama ini dilakukan dengan tenang-tenang, di tengah-tengah semangat bangsa Indonesia memberantas korupsi. Pertanyaannya, kenapa semua itu bisa dilakukan dengan nyaman? Bagaimana pengawasannya selama ini? Termasuk bagaimana auditing keuangannya. Jangan-jangan semacam ini sudah bisa dilakukan sejak saat masih menjabat sebagai gubernur. Tentu saja ini tugas aparat terkait untuk menelusurinya. Mestinya kalau ada atasan semacam itu para bawahannya juga tidak perlu takut untuk tidak melayani, bahkan melaporkan kepada pihak berwajib.

Kita berharap, hal semacam ini tidak terjadi di Kementerian atau lembaga negara lainnya. Bukan hanya pada pemerintahan saat ini, tetapi juga di masa-masa mendatang. Karena itu, di mana saat ini Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka sedang *milang-miling* calon menteri, maka harus dicari figur yang bebas korupsi dan dipercaya tidak akan korupsi. Mestinya juga figur yang sederhana, tidak suka foya-foya, tidak suka mementingkan diri sendiri dan kroninya.

Kita membutuhkan pemimpin yang tahu penderitaan rakyatnya, bisa merasakan penderitaan rakyatnya, dan bersedia kerja keras agar rakyatnya tidak menderita. Untuk bisa mememilihnya tentu harus melihat *track record* atau rekam jejaknya jauh ke belakang. Kiranya masih ada waktu untuk itu. (*)

Tantangan Dakwah Kontemporer

Hamdan Dauly

Dakwah Kampus

Reaktualisasi dakwah dari kampus adalah bagaikan cahaya dalam kegelapan yang memberi pencerahan bagi masyarakat di tengah berbagai persoalan berat. Terkadang berbagai terpaan berat yang dihadapi masyarakat, mulai dari persoalan politik, sosial, hingga himpitan ekonomi, membuat mereka mengambil jalan

membuat lahirnya kegersangan spiritual yang memprihatinkan. Dalam kondisi seperti inilah kahadiran dakwah yang menguatkan, memotivasi, memberi solusi, yang mampu memberi kesejukan dan ketenangan batin sangat dibutuhkan. Reaktualisasi dakwah seperti inilah yang diinginkan masyarakat, dengan langsung pada tindakan nyata bukan hanya sebatas retorika.

Kampus memiliki sejarah panjang dalam usaha penguatan dakwah di tengah masyarakat. Dakwah kampus tidak hanya sebatas ceramah di kampus, di masjid dan tempat pengajian. Dakwah kampus juga terjun langsung ke masyarakat melakukan pemberdayaan, mendampingi kaum miskin, menguatkan yang lemah, memotivasi yang terpuruk, dan juga memberi resolusi konflik. Sejatinnya reaktualisasi dakwah untuk konteks kontemporer saat ini adalah pada aspek konsistensi antara ucapan dengan tindakan.

Dakwah yang ideal akan terwujud manakala juru dakwah (apakah dia kiai, dosen, mahasiswa, politisi, pengusaha, birokrat) bisa konsisten mewujudkan satunya kata dengan tindakan. Ketika kita mengatakan jangan korupsi, jangan kolusi dan jangan nepotisme, maka tidak hanya sebatas retorika, justru harus diwujudkan dalam perbuatan nyata (keteladanan). Bagaimana masyarakat bisa percaya pada pesan dakwah yang disampaikan tokoh agama dan politisi, kalau ucapan tidak sesuai dengan tindakan. Padahal sesungguhnya aspek penting dari reaktualisasi dakwah adalah pada nilai kejujuran, konsistensi dan tindakan nyata (*dakwah bilhal*). (*)

*) **Dr Hamdan Dauly Msi MA**,
Ketua Program Magister KPI UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KR-JOKO SANTOSO

pintas di luar akal sehat. Berbagai kasus patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat, sering dikaitkan dengan faktor himpitan ekonomi dan praktik politik yang sering menghalalkan segala cara. Di sisi lain pemahaman akan nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kesederhanaan, kesabaran dan kekuatan moral semakin tercerabut di tengah semakin kuatnya budaya *hedonis*.

Di tengah budaya *hedonis* dan arus globalisasi yang begitu pesat dewasa ini, banyak masyarakat yang terpuruk dan dilanda krisis moral, salah langkah dan terjerumus pada berbagai tindakan negatif. Pergaulan bebas, keterpurukan moral, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, hingga praktik politik yang menghalalkan segala cara, memerlukan sentuhan dakwah. Dakwah tidak hanya sekadar ceramah di masjid dan di media massa, namun perlu tindakan nyata (*dakwah bilhal*). Gaya hidup masyarakat saat ini yang cenderung sekuler

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakil. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Haso Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salaman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Memperbaiki Iklim Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Pengumpulan ZIS Terkini

Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) merupakan beberapa instrumen Islam yang fokus untuk menciptakan keadilan dalam Islam, melalui keadilan distribusi harta. Ada mekanisme *transfer of wealth* dari *aghniya'* (orang kaya) kepada *fuqoro'* (fakir) sehingga visi besar Islam sebagai agama yang membawa keadilan bisa diwujudkan. Ruh Islam adalah keadilan, dan bukan hanya soal halal haram.

ZIS di Indonesia, potensinya jelas luar biasa, mengingat jumlah penduduk Muslim kelas menengah Indonesia cukup besar. Selain itu, budaya masyarakat Indonesia adalah bangsa yang suka berbagi dan bergotong-royong. Bertemunya spirit pranata agama dan budaya masyarakat ini tentu saja menciptakan sumber daya ekonomi yang besar untuk pengentasan kemiskinan.

Pada Tahun 2023, total pengumpulan dana ZIS mencapai 32T, dan di Tahun 2024 ini ditargetkan mencapai 42T. Angka yang sangat besar tentu saja. Jumlah ini bisa saja terus tumbuh dengan akan adanya *policy mix* yang baik yang akan diambil oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama RI.

Peran Kementerian Agama RI Kementerian Agama RI, sebagai regulator dan fasilitator ZISWAF, tentu saja berkepentingan memastikan bahwa pelaksanaan dan pengalaman ajaran agama Islam dapat terlaksana dengan baik, dan tentu saja dapat memberi dampak optimal kepada masyarakat. Karena itu Pasal 27 UU Zakat memberikan ruang yang luas terkait bagaimana pendayagunaan dana zakat tersebut.

Kemenag RI, melalui Direktorat Zakat dan Wakaf, saat ini perlu fokus melakukan penataan secara menyeluruh terkait dengan tata kelola per-zakat-an nasional. Pertama, penataan regulasi zakat sehingga menciptakan

Dr Abdul Qoyum

iklim pengelolaan zakat yang baik, adil, sehat, dan sesuai syariah. Dalam konteks ini, fungsi regulator harus sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Agama. Sementara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai lembaga pengelola ZIS. Hal ini sangat penting agar tercipta iklim pengelolaan zakat yang sehat dan terpercaya.

Kedua, mewujudkan sistem data ZIS, meliputi data pengumpulan dan mustahik potensial yang kredibel. Data adalah kunci utama kesuksesan sebuah program. Artinya, jika pengelolaan ZIS ingin berjalan optimal, maka keberadaan data yang terpercaya ini menjadi modal pokoknya. Data tersebut, akan menjamin bahwa dana ZIS dapat tersalurkan dengan tepat dan akurat, serta mereduksi potensi penyalahgunaan pemanfaatan dana ZIS oleh oknum tertentu. Data tersebut kemudian akan menjadi acuan dalam perumusan program pendayagunaan dan pendistribusian ZIS di setiap periodenya.

Ketiga, meningkatkan kualitas pengawasan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara dan menjalankan dan mendapatkan manfaat dari ajaran zakat. Sudah jamak kita ketahui terkait adanya lembaga zakat yang mengelola ZIS secara tidak akuntabel. Celakanya, dampak dari oknum lembaga zakat yang nakal tersebut ternyata cukup sistemik, yakni terjadinya penurunan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat terhadap semua lembaga za-

kat. Tentu ini tidak baik, dan Kementerian Agama wajib meningkatkan fungsi pengawasannya.

Keempat, mendorong peningkatan dampak dana ZIS dalam pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mendesain program kolaboratif antarlembaga zakat, dan serta melibatkan semua stakeholder yang fokus kepada pengentasan kemiskinan, seperti Program Kampung Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis KUA.

Kesemuanya itu, tentu saja kata kunciannya adalah perlu adanya sinergi dan kolaborasi berbagai stakeholder zakat dan juga pihak lain, demi mewujudkan iklim filantropi Islam yang sehat, berkualitas, dan berdampak. *Wallohu a'lam*.(*)

*) **Dr Abdul Qoyum MScFin**,
Koordinator Project Management
Unit (PMU) Zakat, Kementerian
Agama RI / Ketua Prodi Ekonomi
Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Pojok KR

'Virtual Office', modus baru peredaran Narkoba.

-- Pasti akan terus muncul modus baru.

'Nitip KK' tak lagi berlaku di PPDB Jalur Zonasi.

-- Mesti bersaing fair di zona masing-masing.

Diduga pungli layanan kamar Lapas, dinonaktifkan.

-- Di Lapas lain juga perlu diwaspadai.

Beraksi